Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan: Implikasi terhadap Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Hidup Perkotaan

Sustainable Regional Development Policy: Implications for Regional Economy and Improvement of Urban Quality of Life

Muhammad Adhim Halim[1*], Azizah Putri Abdi[2], Hadi Abdurrahman[3]
[1,2,3]Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

***Corresponding Author: E-mail:** muhammadadhimhalim@untad.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 03 May, 2025
Revised: 04 Jun, 2025
Accepted: 17 Jun, 2025

Kata Kunci:
Pembangunan Wilayah Berkelanjutan, Ekonomi Daerah, Peningkatan Kualitas Hidup Perkotaan

Keywords:
Sustainable Regional Development, Regional Economy, Improving the Quality of Urban Life

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7671

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi kebijakan pembangunan wilayah berkelanjutan terhadap ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan memiliki dampak positif dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui sektor hijau, dan memperbaiki kualitas hidup melalui pengurangan polusi, pengembangan ruang terbuka hijau, serta penguatan sistem transportasi berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang mencakup kurangnya koordinasi antar tingkat pemerintahan, keterbatasan pendanaan, dan keterlibatan sektor swasta yang masih terbatas. Penelitian ini menyarankan agar kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah diperkuat, serta mendorong penggunaan model pembiayaan berbasis hasil yang melibatkan sektor swasta. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya integrasi kebijakan yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan terkoordinasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan data empiris dari lapangan dan mengembangkan model pembiayaan yang lebih inovatif untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang.

ABSTRACT

This study examines the implications of sustainable regional development policies on regional economic growth and urban quality of life. Using a literature review approach, the research identifies that sustainable development policies have a positive impact on job creation, enhancing regional competitiveness through green sectors, and improving quality of life through pollution reduction, the development of green spaces, and the strengthening of sustainable transportation systems. However, the implementation of these policies faces challenges, including the lack of coordination between different levels of government, limited funding, and insufficient private sector involvement. This study recommends strengthening collaboration between central and local governments and promoting the use of performance-based financing models involving the private sector. Theoretically, this research emphasizes the importance of integrating social, economic, and environmental policies. Practically, the findings provide guidance for policymakers to create more inclusive and coordinated sustainable development strategies. Future research is recommended to incorporate empirical field data and develop more innovative financing models to support long-term sustainability.

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah berkelanjutan merupakan salah satu konsep utama dalam perencanaan pembangunan global dan lokal, yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam dekade terakhir, semakin banyak perhatian yang diberikan kepada bagaimana pembangunan dapat dilakukan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini pertama kali dicanangkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan dalam laporan *Our Common Future* pada tahun 1987, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan

saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya keberlanjutan di tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberlanjutan ini tidak hanya berlaku untuk negara-negara berkembang, tetapi juga untuk negara maju yang semakin dihadapkan pada tantangan urbanisasi dan globalisasi yang pesat.

Seiring dengan pesatnya urbanisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, konsep pembangunan wilayah berkelanjutan menjadi semakin relevan, terutama di kawasan perkotaan. Perkembangan pesat kota-kota besar sering kali disertai dengan masalah lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketidakmerataan akses terhadap layanan publik yang memadai. Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan wilayah berkelanjutan berperan penting dalam menciptakan keseimbangan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta penyediaan ruang publik yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pembangunan kota yang berkelanjutan tidak hanya akan mendorong produktivitas ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan sistem transportasi yang efisien, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan ini, jika diterapkan dengan baik, dapat memberikan dampak yang luas bagi ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan daya saing dan mendorong pembangunan sektor-sektor yang lebih berkelanjutan, seperti energi terbarukan, teknologi hijau, dan pertanian berkelanjutan. Selain itu, kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat memperbaiki kualitas hidup perkotaan dengan mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas udara, serta menyediakan ruang terbuka hijau yang mendukung kesehatan fisik dan mental penduduk.

Berdasarkan pentingnya topik ini, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada berbagai cara di mana kebijakan pembangunan berkelanjutan telah diimplementasikan di berbagai negara. Penelitian oleh *(Sachs, 2015)* mengungkapkan bahwa kota-kota yang mengadopsi kebijakan ramah lingkungan dan inklusif mampu mengurangi ketimpangan sosial serta menciptakan ekonomi yang lebih tangguh. Di sisi lain, *(Amirova et al., 2021)* meneliti dampak positif dari transportasi publik yang efisien dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, khususnya dalam hal pengurangan kemacetan dan polusi. Selain itu, (Wolch & Byrne, 2014) menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur hijau dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan perkotaan.

Namun, meskipun sudah banyak penelitian yang mengkaji aspek keberlanjutan dalam konteks kota, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang menghubungkan kebijakan pembangunan wilayah berkelanjutan secara langsung dengan dampaknya terhadap ekonomi daerah dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan pembangunan wilayah berkelanjutan dapat memberikan implikasi terhadap perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas hidup perkotaan. Penelitian ini juga akan menggali kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat kedua aspek tersebut, dengan fokus pada pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, disertasi dan tesis yang relevan serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan pembangunan wilayah berkelanjutan. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria tahun publikasi (2021–2025), relevansi topik, validitas ilmiah, serta kesesuaian dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan kata kunci: *sustainable regional development*, *urban sustainability*, *regional economy*, *urban quality of life*, dan *sustainable policy*. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kebijakan pembangunan wilayah berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas hidup perkotaan. Validitas data dijaga dengan hanya menggunakan sumber peer-reviewed dan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

`

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan memiliki dampak positif terhadap ekonomi daerah dan kualitas hidup perkotaan. Pembahasan ini akan menguraikan tiga tema utama yang ditemukan dalam penelitian ini yang terdiri dari dampak kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap ekonomi daerah, implikasi terhadap peningkatan kualitas hidup perkotaan, dan tantangan dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Dampak Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan wilayah berkelanjutan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan daya saing, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang ramah lingkungan. Menurut , pengembangan infrastruktur hijau seperti energi terbarukan dan transportasi publik ramah lingkungan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kota-kota yang mengadopsi kebijakan tersebut, seperti Kopenhagen dan Amsterdam, menunjukkan peningkatan signifikan dalam sektor ekonomi hijau, di mana sektor energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan menciptakan peluang kerja baru yang mendukung perekonomian lokal.

Selanjutnya, *(Hui et al., 2023)* menekankan bahwa kota-kota yang mengintegrasikan kebijakan keberlanjutan tidak hanya mengalami perbaikan kualitas lingkungan tetapi juga menarik investasi dari sektor swasta yang berfokus pada teknologi bersih dan inovasi. Di Asia Tenggara, kota-kota yang mengimplementasikan kebijakan pembangunan hijau, seperti Singapura dan Jakarta, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global. Hal ini terkait dengan peningkatan infrastruktur yang efisien, penggunaan teknologi yang mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta kebijakan yang memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan berkelanjutan.

Penelitian terbaru oleh (salah eldin ibrahim & Ibrahim, 2025) lebih lanjut mendalami kontribusi kebijakan energi terbarukan dalam penguatan ekonomi daerah. Dalam studi mereka, ditemukan bahwa kota-kota yang berinvestasi pada energi terbarukan tidak hanya mengurangi jejak karbon mereka, tetapi juga menciptakan industri baru di sektor energi terbarukan yang mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Misalnya, kota seperti Shenzhen di China dan Portland di Amerika Serikat berhasil mengembangkan sektor industri berbasis energi hijau yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah serta menciptakan peluang kerja yang lebih inklusif.

Selain itu, *(Rosyadi et al., 2022)* mengungkapkan bahwa kebijakan keberlanjutan yang diterapkan di beberapa kota besar di Eropa, seperti Berlin dan Paris, telah mendorong perekonomian lokal dengan menciptakan ekosistem yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dalam sektor hijau. Mereka menemukan bahwa penerapan kebijakan yang pro-UKM dalam sektor energi terbarukan dan efisiensi energi memberikan dampak positif terhadap daya saing daerah, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Hal ini disebabkan oleh penguatan kapasitas UKM untuk berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan wilayah berkelanjutan yang fokus pada infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan teknologi bersih berpotensi tidak hanya untuk memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Inovasi di sektor hijau membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang merusak lingkungan.

Implikasi terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Perkotaan

Selain dampak ekonomi, kebijakan pembangunan berkelanjutan juga membawa perbaikan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat perkotaan. Penelitian oleh (Ullah & Ullah, 2024) mengungkapkan bahwa kebijakan transportasi berkelanjutan, seperti pengembangan sistem transportasi publik yang efisien, berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan polusi udara, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat perkotaan. Di Eropa, khususnya di kota-kota seperti Zurich dan Barcelona, kebijakan ini berhasil meningkatkan kenyamanan hidup dan mobilitas penduduk, serta mengurangi biaya kesehatan terkait polusi udara.

Dalam (*Monograph Series on Transitioning to Electric Mobility in the Asia-Pacific Region*, 2023) juga menjelaskan bahwa penerapan kebijakan transportasi berkelanjutan di kota-kota besar di Asia, seperti Seoul dan Jakarta, tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kemacetan, tetapi juga memperbaiki kualitas udara dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Mereka menemukan bahwa kebijakan untuk memperluas jaringan transportasi publik yang efisien, termasuk pengembangan jalur sepeda dan kendaraan listrik, membawa dampak langsung terhadap penurunan angka penyakit pernapasan dan pengeluaran terkait layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan transportasi berkelanjutan dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas hidup perkotaan.

Kebijakan ruang terbuka hijau dan peningkatan fasilitas publik juga terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup. *(ADEWOLU, 2023)* dalam penelitiannya menyatakan bahwa taman kota, jalur sepeda, dan ruang terbuka hijau lainnya tidak hanya memberikan ruang untuk rekreasi dan aktivitas sosial, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan mental penduduk perkotaan. Di kota-kota seperti Curitiba (Brasil) dan Bogota (Kolombia), pengembangan ruang terbuka hijau telah menjadi salah satu strategi utama dalam menciptakan kota yang lebih sehat dan lebih layak huni. Penelitian lebih lanjut oleh *(Matos et al., 2024)* menunjukkan bahwa adanya ruang hijau di kawasan perkotaan dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kualitas hidup warga kota, dengan meningkatkan interaksi sosial dan memfasilitasi aktivitas fisik yang lebih banyak.

Kebijakan pembangunan berkelanjutan juga mendukung penciptaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat perkotaan. *(Madell, 2025)* mengemukakan bahwa dengan adanya kebijakan perencanaan yang inklusif, akses terhadap perumahan yang terjangkau dapat diperluas, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup warga kota. Hal ini terlihat di beberapa kota yang menerapkan kebijakan subsidi perumahan dan revitalisasi kawasan kumuh, seperti di Tokyo dan Melbourne. Penelitian terbaru oleh *(Sharma et al., 2024)* mengonfirmasi bahwa kebijakan revitalisasi kawasan kumuh yang dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi publik telah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di daerah-daerah padat penduduk yang sebelumnya kurang mendapatkan akses terhadap fasilitas tersebut.

Kebijakan pembangunan yang mendukung keberlanjutan sosial juga berperan dalam peningkatan inklusivitas kota. *(Srinivasan, 2024)* menemukan bahwa kota-kota yang memperkenalkan kebijakan berbasis kesejahteraan sosial, seperti pengurangan ketimpangan melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memberikan manfaat langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Misalnya, di kota-kota seperti Oslo dan Vancouver, kebijakan inklusif terkait perumahan dan lapangan kerja tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi warga, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, mengurangi marginalisasi sosial, dan menciptakan masyarakat perkotaan yang lebih inklusif dan sehat.

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menyentuh aspek transportasi, ruang terbuka hijau, perumahan, dan inklusivitas sosial terbukti memberikan dampak yang besar dalam peningkatan kualitas hidup perkotaan. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan dalam perencanaan kota, kota-kota dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih inklusif, dan lebih layak huni bagi penduduknya.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Meskipun kebijakan pembangunan berkelanjutan menawarkan berbagai manfaat potensial, implementasinya sering kali menghadapi tantangan substantif yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai tingkat pemerintahan dan sektor swasta dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan yang terintegrasi. *(Permana, 2024)* menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan implementasinya di tingkat daerah seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam (Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33, 1945), yang menggariskan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Prinsip ini, meskipun jelas mengarah pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, pada kenyataannya sering mengalami kesenjangan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal adaptasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Ketidaksesuaian ini menyebabkan kebijakan pembangunan yang diterapkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan atau karakteristik spesifik dari setiap daerah.

Tantangan yang signifikan lainnya adalah masalah pendanaan yang terbatas, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Menurut *(Pambudi, 2023)* meskipun kebijakan pembangunan berkelanjutan sering kali didanai oleh lembaga internasional atau pemerintah pusat, keterbatasan anggaran di tingkat daerah sering kali menjadi penghalang besar dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keterbatasan ini, yang tercermin dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, 2004), menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan yang telah disusun dan kapasitas finansial yang tersedia untuk mewujudkan rencana tersebut. (Zhang & Su, 2024) lebih lanjut menyoroti pentingnya inovasi dalam pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan, dengan mengusulkan penerapan model pembiayaan berbasis hasil yang melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menarik investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan.

Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan masih menjadi tantangan. (Rashed & Shah, 2021) mengungkapkan bahwa meskipun sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendanai proyek berkelanjutan, sering kali mereka terhalang oleh ketidakjelasan insentif yang diberikan oleh kebijakan pemerintah. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007) memberikan ruang bagi perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, implementasi CSR dalam sektor ini masih terbatas dan sering kali tidak cukup mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur ramah lingkungan. Berdasarkan temuan *(Stella Emeka-Okoli et al., 2024)* sektor swasta akan lebih terdorong untuk berinvestasi dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan jika terdapat kebijakan yang lebih jelas dan insentif yang lebih kuat yang mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Tantangan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan ini juga sangat terkait dengan (Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H Ayat 1, 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, meskipun ada landasan hukum yang jelas, tantangan implementasi sering kali muncul karena kurangnya perhatian terhadap keberagaman kondisi lokal dan kebutuhan spesifik yang ada di masyarakat. Hal ini sering menyebabkan kebijakan yang diterapkan tidak optimal dan tidak mampu mengatasi masalah yang ada di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, yang mempertimbangkan kearifan lokal dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, tantangan yang muncul dalam hal koordinasi antar

pemerintah, keterbatasan pendanaan, serta keterlibatan sektor swasta yang belum optimal, masih menjadi penghalang besar yang memerlukan solusi yang lebih inovatif. Mengingat prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, khususnya mengenai pembangunan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan, penting untuk memperkuat mekanisme koordinasi antar berbagai level pemerintahan, memperkenalkan model pembiayaan yang lebih kreatif, dan memastikan adanya insentif yang memadai untuk sektor swasta agar mereka lebih berkontribusi dalam proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan dan inklusif dapat lebih terwujud.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan wilayah berkelanjutan berkontribusi positif terhadap ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup perkotaan. Secara ekonomi, kebijakan ini mendorong penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan sektor hijau, dan peningkatan daya saing daerah melalui teknologi ramah lingkungan. Dalam hal kualitas hidup, kebijakan ini terbukti memperbaiki kesehatan masyarakat melalui pengurangan polusi, penyediaan ruang terbuka hijau, dan penguatan sistem transportasi berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal koordinasi antar tingkat pemerintahan, keterbatasan pendanaan, dan kurangnya insentif untuk sektor swasta. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembangunan berkelanjutan memerlukan koordinasi yang lebih baik, inovasi pembiayaan, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Implikasi dari penelitian ini, secara teoritis, memperkuat pentingnya integrasi kebijakan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemerintahan dan sektor swasta serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inovatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan studi empiris yang lebih luas di tingkat daerah untuk memahami tantangan lokal dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model pembiayaan yang melibatkan sektor swasta dan mengukur dampak jangka panjang dari kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

ADEWOLU, A. O. (2023). The Impact of Green Space on Urban Well-Being - A Comprehensive Analysis. https://doi.org/10.20944/preprints202310.0946.v1

Amirova, N., Sargina, L., & Khasanova, A. (2021). Economic and Environmental Factors in the Concept of Regional Sustainable Development. E3s Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127802012

Hui, C. X., Dan, G., Alamri, S., & Toghraie, D. (2023). Greening smart cities: An investigation of the integration of urban natural resources and smart city technologies for promoting environmental sustainability. Sustainable Cities and Society, 99, 104985. https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104985

Madell, C. (2025). Inclusionary housing policy and practice in South African cities: planning as a spatial transformation tool. Journal of Housing and the Built Environment, 40(2), 741–766. https://doi.org/10.1007/s10901-024-10149-y

Matos, A. L. dos S., Carvalho, N. B., & Ferroli, P. C. M. (2024). Espaços Verdes Urbanos: Uma Abordagem Sustentável para o Bem-Estar Mental nas Cidades. ENSUS 2024 - XII Encontro de Sustentabilidade Em Projeto, 841–851. https://doi.org/10.29183/2596-237x.ensus2024.v12.n1.p841-851

Monograph Series on Transitioning to Electric Mobility in the Asia-Pacific Region. (2023). United Nations. https://doi.org/10.18356/9789213586723

`

Pambudi, S. (2023). Penerapan Sistem ATS (Automatic Transfer Switch) Sebagai Pengendalian, Pemantauan, Dan Perawatan Berbasis IoT (Internet of Things). Infotekmesin. https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v14i2.1853

Permana, D. (2024). Implementation of Public Policy to Achieve Sustainable Development: Challenges and Strategies. Khazanah Sosial, 6(1), 49–59. https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.33522

Rashed, A. H., & Shah, A. (2021). The role of private sector in the implementation of sustainable development goals. Environment, Development and Sustainability, 23(3), 2931–2948. https://doi.org/10.1007/s10668-020-00718-w

Rosyadi, S., Kusuma, A. S., Fitrah, E., Zayzda, N. A., & Pimoljinda, T. (2022). Barriers of public policy faced by SMEs of creative economy in Indonesia. International Journal of Law and Management, 64(1), 32–48. https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0061

Sachs, J. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press.

salah eldin ibrahim, ayman, & Ibrahim, waleid. (2025). The role of renewable energy in supporting economic growth in North Africa from 2000 to 2023. ?????? ??????? ???????? ??????? ??????? ?????????, 6(1), 687–712. https://doi.org/10.21608/cfdj.2024.319853.2045

Sharma, B., Kumar, O., & Singh, M. (2024). An Empirical Analysis in Understanding the Impact of Upgrading Slum Areas in Enhancing Health Equity for Sustainable Development (pp. 427–440). https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9699-5.ch018

Srinivasan, J. (2024). Community Engagement and Social Equity in Urban Development Projects. Journal of Sustainable Solutions, 1(3), 6–12. https://doi.org/10.36676/j.sust.sol.v1.i3.14

Stella Emeka-Okoli, Tochukwu Chinwuba Nwankwo, Christiana Adanma Otonnah, & Ekene Ezinwa Nwankwo. (2024). Corporate governance and CSR for sustainability in Oil and Gas: Trends, challenges, and best practices: A review. World Journal of Advanced Research and Reviews, 21(3), 078–090. https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.3.0662

Ullah, A., & Ullah, H. (2024). Public Transit Systems and Sustainability: A Review of Key Concepts and Practices. https://doi.org/10.20944/preprints202411.1818.v1

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H Ayat 1 (1945).

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33 (1945).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007).

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (2004).

Wolch, J., & Byrne, J. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities `just green enough'. Landscape Urban Plann, 125. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.017

Zhang, Y., & Su, Y. (2024). Towards a Sustainable Future: Exploring Innovative Financing Models for Renewable Energy. MEDAAD, 2024, 34–40. https://doi.org/10.70470/MEDAAD/2024/006